



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P - 36 / DISKOPUKM / SET.1 / 821 / 01 / 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676)
8. Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022;



15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan Perkembangan Pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan SKPD / Unit SKPD.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan / Sub Kegiatan SKPD / Unit SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang / Jasa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 07 Januari 2022.



Kepala,

Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640405 198603 1 036

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR : 36 / DISKOPUKM / SET.1 / 821 / 01 / 2022 , TANGGAL 07 JANUARI 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN DAN STAF PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	JUDUL KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	KETERANGAN
1	2	3	4	6
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1	2.17.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	93.926.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2	2.17.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32.150.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	104.441.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.847.269.087	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	91.211.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2	2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.050.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
3	2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
4	2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.600.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
5	2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.800	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
6	2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
7	2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.071.535	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	

NO	JUDUL KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	KETERANGAN
1	2	3	4	6
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.700.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2	2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.171.860	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
3	2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.821.400	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.199.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.859.432	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
3	2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	942.732.488	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.236.000	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	650.800.000	H. Samijan, SE	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
1	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	H. Samijan, SE	
2	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	H. Samijan, SE	

NO	JUDUL KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	KETERANGAN
1	2	3	4	6
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	H. Samijan, SE	
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	Endri Rosandi, S.Sos	
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	375.000.000	Endri Rosandi, S.Sos	
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
1	2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	500.000.000	H. Dianto Raharjo, SP.,MP	
2	2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	550.000.000	H. Dianto Raharjo, SP.,MP	
1	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.090.000.000	H. Dianto Raharjo, SP.,MP	

NO	JUDUL KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	KETERANGAN
1	2	3	4	6
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
1	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.450.000.000	H. Dianto Raharjo, SP.,MP	



 Kepala
Drs. H. Tajuddin
 Pembina Utama Muda
 NIP.19640405 198603 1 036